

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN GDP,
INFLASI, BI RATE DAN NILAI TUKAR TERHADAP
KREDIT BERMASALAH PADA BANK
KONVENSIIONAL DAN BANK SYARIAH**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Silvia Eka Febrianti
115020101111032**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

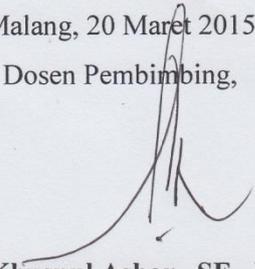
**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN GDP, INFLASI, BI RATE DAN
NILAI TUKAR TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

Yang disusun oleh :

Nama : Silvia Eka Febrianti
NIM : 115020101111032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2015

Malang, 20 Maret 2015
Dosen Pembimbing,


Dr. Khusnul Ashar., SE., MA
NIP. 19550815 198403 1 002

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN GDP, INFLASI, BI RATE DAN NILAI
TUKAR TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BANK KONVENSIONAL DAN
BANK SYARIAH**

Silvia Eka Febrianti, Dr. Khusnul Ashar., SE., MA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: Silviaekafebrianti@gmail.com

ABSTRAK

Indonesian Banking use Dual-Banking System since the enactment of UU no. 7 in 1992 and UU no. 10 in 1998. Credit or Lending by conventional banks and syaria banks will always carry the credit risk or Non Performing Loan (NPL) and Non Performing Finance (NPF). NPL and NPF can be caused by banks external and internal factors. This Research attempts to identify the effect of external factors (macroeconomic variables) to NPL in conventional banking and NPF in syaria banking. Macroeconomic variables used in this research are GDP growth, Inflation (CPI), BI Rate, and Exchange Rate.

By using Error Correction Model (ECM), the results showed that in short term, only Exchange Rate that has a significant effect in NPL conventional banks and all independent variables have no effect in NPF syaria banks. In the Long term, GDP Growth, Inflation (CPI), BI Rate, and Exchange Rate have significant effect on the NPL conventional banks. However, only BI Rate that has significant effect on NPF syaria banks in the long term.

Key Words: NPL, NPF, Conventional Bank, Syaria Bank, ECM

A. LATAR BELAKANG

Perbankan Indonesia menggunakan dual-banking system sejak tahun 1992 dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, khususnya untuk bank syariah mulai berkembang pesat sejak berlakunya UU nomor 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank untuk beroperasi dengan system konvensional dan/atau system syariah. Bank konvensional maupun bank syariah tentu saja menjalankan fungsi utama bank yakni fungsi intermediasi sebagai penyalur dana dan penghimpun dana.

Khususnya untuk menjalankan fungsi menyalurkan dana, hingga saat ini baik bank konvensional maupun bank syariah masih menjadikan kredit sebagai pemasukan utama. Tentunya semua kredit yang disalurkan tidak bebas dari risiko. Saat bank menyalurkan kredit maka bank akan selalu menghadapi risiko kredit. Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan dari pinjaman yang diberikannya (Darmawi, 2012). Kualitas kredit harus sangat diperhatikan sebab bila terjadi kredit bermasalah akan mengancam keberlangsungan bank dan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang diukur melalui indikasi kinerja keuangan perbankan. Dalam hal ini, maka tingkat kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh Rasio Non Performing Loan (NPL) pada bank konvensional dan Rasio Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah. Semakin rendah rasio NPL atau NPF maka semakin baik kondisi bank tersebut, sebab tingkat kredit bermasalahnya rendah.

Baik bank konvensional maupun bank syariah, dalam menyalurkan kredit/ pembiayaan akan menghadapi risiko kredit atau risiko pembiayaan. Sehingga penting untuk menganalisis risiko kredit/pembiayaan. Bila dilihat pada data rasio NPL dan NPF (Bank Indonesia, 2013), rasio NPF bank syariah masih lebih tinggi daripada rasio NPL bank konvensional. Pada tahun 2013 kuartal 4 rasio NPF adalah sebesar 2.88% sedangkan rasio NPL adalah 1.79%. Begitupun pada masa krisis dan pasca krisis keuangan global nilai rasio NPF cukup jauh berbeda dengan rasio NPL, misalnya pada periode 2009 kuartal tiga NPF bank syariah mencapai 5.49% sedangkan NPL bank konvensional sebesar 3.90%.

Penyebab kredit macet sendiri bisa disebabkan dari sisi internal dan sisi eksternal. Dari sisi eksternal bisa disebabkan faktor-faktor seperti perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga faktor-faktor produksi, peningkatan persaingan dalam bidang usaha, meningkatnya

tingkat suku bunga pinjaman, resesi, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya (Kuncoro, 2002). Pengaruh secara eksternal itu sendiri bisa berdampak langsung maupun berdampak tidak langsung terhadap NPL bank konvensional dan NPF bank syariah.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa faktor eksternal seperti pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate atau Suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh terhadap NPL. Dalam penelitian Poetry dan Sanrego (2011) yang melakukan perbandingan terhadap NPL dan NPF, dengan melihat variabel makro dan mikro yang berpengaruh terhadap NPL bank konvensional dan NPF bank syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada NPL bank konvensional lebih dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, sedangkan pada NPF bank syariah lebih dipengaruhi kondisi mikroekonomi internal perbankan itu sendiri seperti FDR dan CAR.

Dengan uraian yang telah diatas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Variabel Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan nilai tukar berpengaruh terhadap NPL Bank Konvensional dalam jangka panjang dan jangka pendek?
2. Apakah Variabel Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, nilai tukar berpengaruh terhadap NPF bank Syariah dalam jangka panjang dan jangka pendek?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Hasibuan (2001) mendeskripsikan kredit sebagai semua jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali beserta bunganya oleh pihak debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kredit memiliki risiko meskipun sebaik apapun analisa kredit serta kebijakan kredit yang diterapkan oleh bank. Selalu ada probabilitas atau kemungkinan bahwa kredit akan mengalami ketidاكلancaran dalam pengembaliannya atau disebut juga Non-Performing Loan (NPL) pada bank konvensional dan Non-Performing Financing (NPF) pada bank syariah.

Diulio (1993) menyebut risiko kredit sebagai salah satu risiko keuangan yakni risiko cedera janji. Risiko ini dapat terjadi karena debitur tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian kredit seperti kelambatan membayar bunga, kelambatan membayar pokok pinjaman, atau bahkan tidak membayar sama sekali karena bangkrut sehingga akan mengakibatkan pinjaman yang dikembalikan lebih sedikit dari yang dijanjikan debitur. Risiko kredit yang dihadapi bank syariah didefinisikan sebagai kegagalan nasabah dalam memenuhi liabilitas kepada bank syariah sesuai kewajiban. Risiko ini juga disebut risiko gagal bayar (default risk) atau disebut pula risiko pembiayaan (financing risk) (Wahyudi, Dkk, 2013).

Rustam (2013) menyebutkan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah dinilai dari aspek kredit dikarenakan siklus bisnis dan industry yang menurun. Selain itu penyebab kredit gagal dinilai dari faktor eksternal disebabkan karena kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan. Indikator risiko kredit yang diadaptasi dan disesuaikan dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011 juga menyebutkan faktor eksternal dengan parameter atau indikator perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang mempengaruhi nilai tukar, siklus usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Maka hubungan antar variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hubungan antara Pertumbuhan GDP dan Kredit/ Pembiayaan Bermasalah

Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) didefinisikan sebagai pertumbuhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan menjumlahkan semua output dari warga negara yang bersangkutan ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan (Putong, 2002).

Hubungan antara kredit bermasalah dan PDB terjadi pada aktivitas ekonomi. Penurunan GDP riil juga merupakan karakteristik umum terjadinya resesi (Samuelson & Nordhaus, 2001), pada saat resesi maka akan terjadi kelesuan ekonomi seperti misalnya pembelian konsumen yang menurun drastic sehingga laba bisnis bagi produsen akan menurun. Hal tersebut dapat berdampak kapasitas produsen sebagai debitur pada perbankan.

Hubungan antara Inflasi dan Kredit/ Pembiayaan Bermasalah

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus menerus yang berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan konstan (Putong, 2002). Risiko keuangan juga muncul dikarenakan adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tak terduga maka

akan menyebabkan risiko daya beli. Risiko daya beli yaitu nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan (Diulio, 1993).

Hubungan yang terjadi antara Inflasi dan kredit bermasalah terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Saat konsumsi akan barang dan jasa turun artinya permintaan akan barang dan jasa juga turun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan produsen. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya. Selain itu saat terjadi inflasi akan menyebabkan beban hidup akan semakin tinggi karena biaya untuk melakukan konsumsi akan meningkat, dan bila secara riil pendapatan menurun atau pendapatan tetap maka akan menjadi kesulitan bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman pada bank.

Hubungan antara BI Rate dan Kredit/ Pembiayaan Bermasalah

BI Rate oleh Bank Indonesia didefinisikan sebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Diharapkan dengan ketetapan BI Rate oleh BI dapat di implementasikan di pasar uang dalam bentuk pengelolaan likuiditas agar mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional tersebut dapat dicerminkan dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Diharapkan dari adanya pergerakan suku bunga PUAB akan diikuti oleh pergerakan suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan suku bunga lainnya (Bank Indonesia, 2013).

Kenaikan BI Rate yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit bank dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah sebab beban bunga yang harus ditanggung debitur akan semakin berat. Meskipun Bank Syariah tidak mengenal system bunga dan kegiatan operasionalnya, namun baik bank syariah dan bank konvensional sebagai lembaga bisnis maka menghadapi persaingan di industry perbankan.

Saat BI Rate naik, maka nisbah bagi hasil bank syariah (profit loss sharing) akan mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman bank konvensional yang meningkat (peningkatan daya saing bank syariah), produk pembiayaan oleh syariah akan semakin kompetitif. Artinya saat BI Rate naik akan diikuti dengan suku bunga kredit bank konvensional. Sedangkan margin atau nisbah bagi hasil bank syariah yang ditentukan oleh kapasitas usaha atau laba/rugi debitur tidak bisa naik begitu saja, maka margin tersebut akan lebih bersaing terhadap suku bunga kredit bank. Debitur akan cenderung mencari bunga yang lebih rendah saat melakukan pinjaman, maka saat suku bunga kredit bank konvensional naik akibat kenaikan BI Rate maka debitur akan memilih opsi lain yakni melakukan pinjaman atau pembiayaan pada bank syariah yang biaya dananya dianggap lebih rendah dibandingkan bunga bank konvensional yang sedang meningkat.

Hubungan antara Nilai Tukar dan Kredit/ Pembiayaan Bermasalah

Nilai tukar dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs dibagi dua yakni kurs nominal dan kurs riil. Menurut Samuelson & Nordhaus (2001) kurs nominal adalah harga relative mata yang dari dua negara, sedangkan kurs riil adalah harga relative dari barang-barang di antara dua negara.

Salah satu indikator keuangan dan makroekonomi yang terpengaruh dari adanya fluktuasi ekonomi adalah nilai tukar. Kuncoro (2002), menjelaskan bahwa dinamika krisis salah satunya adalah pada nilai tukar. Saat terjadi resesi atau bahkan krisis akan menyebabkan keluarnya modal asing akibat perilaku spekulatif para investor, akibatnya nilai mata uang dalam negeri terdepresiasi. Terdepresiasinya kurs akan diikuti dengan peningkatan dalam jumlah besar untuk biaya domestic untuk hutang luar negeri. Peningkatan premi risiko dan kontraksi moneter yang terjadi untuk menopang kurs mengakibatkan tingkat suku bunga naik dan memberatkan masalah pembayaran kembali pinjaman.

Perubahan dari nilai kurs rentan terhadap kredit eksternal yang bermasalah dan jatuhnya nilai tukar dikarenakan adanya kepanikan pada kalangan pelaku pasar. Hubungan antara kredit bermasalah dan nilai tukar dapat berdampak pada aktivitas ekonomi khususnya produsen yang menggunakan bahan baku impor, sehingga dengan terdepresiasinya nilai tukar maka harga bahan baku impor naik dan hal tersebut membebani biaya produksi, pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada profit dan pendapatan produsen. Maka produsen sebagai debitur akan terpengaruh terhadap pembayaran pinjaman pada bank.

Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia

Bank Umum Konvensional (BUK) adalah bank yang beroperasi dengan menggunakan system bunga dalam kegiatan operasionalnya. Berbeda dengan Bank umum Syariah (BUS) dengan system bagi hasilnya, prinsip syariah yang dimanifestasikan dalam kegiatan menyalurkan dana atau pembiayaan bisa dalam bentuk transaksi jual beli (prinsip mudharabah, murabahah, ijarah dan prinsip jual beli lainnya); bisa pula dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah, dan prinsip bagi hasil lainnya); bisa pula dalam bentuk pembiayaan lainnya (prinsip hiwalah, rahn, qardh) (Hasibuan, 2001).

Pada akad syirkah yakni mudharabah dan musyarakah, sangat fleksibel mengikuti dinamika pasar. Artinya, saat pasar dalam kondisi baik dan bertumbuh maka bank akan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar, dan begitupun sebaliknya jika pasar tumbuh negative maka bank akan turut menanggung risiko bersama nasabah atau bahkan bank akan mentransfer risiko tersebut pada nasabah (Wahyudi, 2013). Sampai saat ini struktur potofolio pembiayaan syariah didominasi oleh akad berbasis jual beli yakni akad murabahah, hal ini disebabkan pada akad murabahah menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti melalui margin yang ditetapkan diawal.

Bank konvensional tentunya saja menjadikan profit sebagai tujuan utama, sedangkan bank syariah dalam konsepnya tidak menjadikan profit sebagai tujuan utama melainkan lebih kepada tujuan memberi akses kepada semua orang. Tidak digunakannya system bunga melainkan penggunaan system profit loss sharing dianggap lebih menunjukkan aspek keadilan (Yustika, 2012). Namun dalam praktiknya perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan aspek keadilan secara penuh, dengan kata lain perbankan syariah di Indonesia masih berorientasi pada bisnis (profit) dan belum menerapkan prinsip syariah secara murni. Selanjutnya Yustika (2012) juga menerangkan dasar dari pernyataan bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya bersih dari praktek riba yang harusnya dihindari oleh perbankan syariah. Pertama, motif profit masih terlihat jelas dan menjadi pertimbangan utama sehingga akses pelaku ekonomi kecil belum menjadi fokus perbankan syariah. Kedua, prinsip profit-loss sharing masih belum dipraktekkan secara benar di lapangan karena berbagai kondisi. Alasan ketiga, orientasi material masih sangat terlihat karena porsi motif laba dan penanggalan aspek keadilan dalam penerapan operasi bank syariah.

Alasan mengapa Bank Syariah belum dapat menjalankan prinsip syariah murni karena permasalahan-permasalahan yang melekat pada Bank Syariah. Perbankan konvensional terpaksa menyesuaikan produk-produknya sesuai hukum perbankan konvensional, karena perangkat perundang-undangan Bank Syariah masih dinilai kurang merupakan salah satu alasannya. Dengan demikian ciri-ciri yang terdapat pada bank syariah menjadi tersamarkan dan menjadi tampak seperti bank konvensional (Machfud & Rukmana, 2010).

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi. Sehingga penelitian dengan analisis deskriptif ini dapat diperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini yang sedang terjadi serta melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Ruang lingkup penelitian yakni seluruh bank umum konvensional dan bank umum syariah serta unit-unit syariah yang termasuk di dalam laporan statistik perbankan Indonesia.

Populasi Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sumbernya diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data time series (lintas waktu) yang digunakan pada penelitian ini meliputi data quartal tahun 2006 quartal satu hingga tahun 2014 quartal dua dari NPL Bank Umum Konvensional, NPF Bank Umum Syariah dan Unit-unit syariah, Pertumbuhan GDP riil, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai Tukar.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yakni dengan menggunakan Error Correction Model (ECM). Error Correction Model (ECM) adalah model untuk mengoreksi persamaan regresi di antara variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar kembali pada nilai ekuilibriumnya dalam jangka panjang (Ajija, dkk, 2011).

Syarat utama digunakannya model ECM adalah adanya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang tidak stasioner atau disebut juga sebagai hubungan kointegrasi. Pada hubungan kointegrasi diharapkan terdapat mekanisme jangka panjang yang dapat mengembalikan variabel-variabel pada titik ekuilibriumnya (Ariefianto, 2012).

Untuk menguji apakah ada hubungan kointegrasi, dapat dilakukan dengan pengujian kointegrasi dengan pendekatan residual. Pengujian residual ini untuk melihat apakah u dari persamaan regresi adalah $I(0)$. Kemudian dilakukan uji unit root pada residual tersebut dengan uji Dickey Fuller. Kerangka pengujian dengan nilai kritis Engle-Granger (EG) yang digunakan untuk uji kointegrasi ini disebut model koreksi kesalahan model Engle-Granger 2 tahap (Ariefianto, 2012)..

Tahap pertama metode EG adalah dengan memastikan semua variabel adalah $I(1)$ dan melakukan regresi OLS sesuai bentuk kointegrasi yang diasumsikan. Tahap kedua dilakukan dengan menggunakan residual yang diperoleh dari tahap pertama untuk diestimasi pada model koreksi kesalahan (Ariefianto, 2012).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioner amat penting dilakukan untuk analisis dengan data time series, sebab konsekuensi bila data tidak stasioner maka fenomena regresi lancung (spurious regression). Dari hasil uji stasioneritas data dengan metode Augment Dickey Fuller (ADF) diketahui bahwa kelima variable yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan pada derajat level sehingga harus kembali diuji stasioneritas dengan tes kedua yakni pada derajat 1st Difference.

Tabel 1: Hasil Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Variabel	Level	Prob.	ADF-test	Kesimpulan
NPL	Level	0.7775	-1.5845	Tidak Stasioner
	1 st Difference	0.0002	-5.7594	Stasioner
NPF	Level	-2.5346	0.3106	Tidak Stasioner
	1 st Difference	-4.1211	0.0143	Stasioner
Pertumbuhan GDP	Level	0.5663	-2.0256	Tidak Stasioner
	1 st Difference	0.0009	-5.2304	Stasioner
IHK	Level	0.6652	-2.3077	Tidak Stasioner
	1 st Difference	0.0035	-4.7041	Stasioner
BI Rate (BIR)	Level	0.0604	0.6011	Tidak Stasioner
	1 st Difference	0.0010	-5.3662	Stasioner
Nilai Tukar (EX)	Level	0.4319	-2.2804	Tidak Stasioner
	1 st Difference	0.0058	-4.5132	Stasioner

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Dari hasil uji stasioneritas data pada 1st Difference, semua variable yang digunakan dalam penelitian stasioner pada difference yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas ADF test dari masing-masing variable yang lebih besar dari 0.05 dan 0.10 ($\alpha=5\%$ dan $\alpha=10\%$).

Uji Kointegrasi

Uji Kointegrasi diperlukan untuk melihat adakah hubungan jangka panjang antara NPL/NPF dan keempat variable independen (GDP,IHK, BIR, dan KURS) dilakukan dengan melakukan uji unit root Engle-Granger 2 tahap. Pengujian kointegrasi dilakukan pada residual dengan menggunakan model Augmented Dickey-Fuller (ADF).

Tabel 2: Hasil Uji Stasioneritas RESID02 Model NPL

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.187479	0.0301
Test critical values:		
1% level	-3.653730	
5% level	-2.957110	
10% level	-2.617434	

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Hasil uji kointegrasi dengan menguji stasioneritas residual (-1) didapatkan nilai prob t-statistik dari RESID02 sebesar $0.0301 < 0.05$, Hasil ADF test > Critical value pada tingkat 5% yaitu $-3.187479 > -2.957110$, maka H_0 ditolak dan dinyatakan RESID02 stasioner pada derajat level. Artinya terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara variable dependen dan variable independennya pada model NPL.

Tabel 3: Hasil Uji Stasioneritas RESID02 Model NPF

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.744721	0.0036
Test critical values:		
1% level	-4.309824	
5% level	-3.574244	
10% level	-3.221728	

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Pada hasil uji kointegrasi model NPF, didapatkan nilai probabilitas ADF test sebesar 0.0036. Nilai probabilitas tersebut memiliki nilai kurang dari tingkat signifikansi 5% dan 10%. Hasil ADF test > Critical value pada tingkat 5% yaitu $-4.744721 > -3.574244$, sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi) antara variable dependen dan variable independen model NPF pada penelitian ini.

Estimasi Error Correction Model (ECM)

Setelah melakukan uji kointegrasi dan diketahui terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan independen pada model NPL dan NPF, maka dapat dilanjutkan estimasi pada ECM. Dari hasil pengujian model ECM diperoleh persamaan regresi dan hasil estimasi sebagai berikut:

$$D(NPL) = -0.138609592888 - 0.223240874892 * D(GDP) + 0.0110346940688 * D(IHK) + 0.0349612212679 * D(BIR) - 0.000457961718601 * D(EX) - 0.553729077268 * ECT$$

Besaran koreksi kesalahan (ECT) sebesar -0.553 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dikoreksi dalam 1 kuartal adalah sebesar 55%. Dapat pula dikatakan bahwa penyesuaian jangka pendek terhadap keseimbangannya terjadi dalam kurang dari dua bulan

Tabel 4: Hasil ECM Model NPL

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.	Keterangan
d(GDP)	-0.223241	-1.522275	0.1396	Tidak Signifikan
d(IHK)	0.011035	1.365175	0.1835	Tidak Signifikan
d(BIR)	0.034961	0.251098	0.8036	Tidak Signifikan
d(EX)	-0.000458	-2.533763	0.0174	Signifikan
RESID02 / ECT	-0.553729	-4.145801	0.0003	Signifikan
C	-0.138610	-1.956297	0.0608	
R-Square	0.408981			
Adj. R-Square	0.299533			
F-statistik	3.736760			
Prob. F-statistik	0.010632			

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Pada hasil estimasi ECM diketahui bahwa secara simultan keempat variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yakni NPL. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar $0.010 < 0.05$ ($\alpha=0.05$). Dapat pula dikatakan bahwa variable GDP, IHK, BIR, dan LN_EX berpengaruh terhadap NPL secara bersama-sama.

Sedangkan secara parsial hanya variable EX yang signifikan berpengaruh pada NPL. EX memiliki koefisien sebesar 0.000458 dengan tanda hubungan negative, sehingga dalam jangka pendek saat EX naik satu rupiah maka akan menurunkan NPL sebesar 0.000458 persen. Untuk variable GDP, IHK, dan BIR berpengaruh namun tidak signifikan terhadap NPL. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas t-Statistik untuk model jangka pendeknya kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 10%.

Dari hasil pengujian ECM pada model NPF diperoleh persamaan regresi dan hasil estimasi sebagai berikut:

$$D(NPF) = -0.0715593456356 + 0.0638620547949 \cdot D(GDP) - 0.00946303853071 \cdot D(IHK) - 0.326909157525 \cdot D(BIR) + 9.66115919409 \cdot 10^{-5} \cdot D(EX) - 0.213043737828 \cdot ECT$$

Tabel 5: Hasil ECM Model NPF

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.	Keterangan
d(GDP)	0.063862	0.366211	0.7171	Tidak Signifikan
d(IHK)	-0.009463	-1.020858	0.3164	Tidak Signifikan
d(BIR)	-0.326909	-1.954196	0.0611	Tidak Signifikan
d(EX)	9.66E-05	0.495082	0.6245	Tidak Signifikan
RESID02 / ECT	-0.213044	-2.412865	0.0229	Signifikan
C	-0.071559	-0.829845	0.4139	
R-Square	0.265271			
Adj. R-Square	0.129210			
F-statistik	1.949644			
Prob. F-statistik	0.118861			

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Dengan uji simultan didapatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.118861 yang mana nilai tersebut lebih dari tingkat signifikansi 5% dan 10% ($0.118861 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (GDP, LN_IHK, BIR, dan LN_EX) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (NPF) dalam jangka pendek. Sehingga kesimpulannya meskipun terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang namun tidak terdapat hubungan jangka pendek pada model yang diteliti.

Nilai koefisien ECT yang nilai absolutnya kurang dari satu, bertanda negative, dan signifikan menunjukkan bahwa koefisien ECT valid. Besaran koreksi kesalahan sebesar -0.213044 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dikoreksi dalam 1 kuartal adalah sebesar 21%.

Estimasi Hubungan Jangka Panjang

Hasil estimasi model NPL selama periode 2006 kuartal satu sampai dengan dengan 2014 kuartal dua, Untuk model jangka panjang didapatkan persamaan regresi dan hasil estimasi sebagai berikut adalah sebagai berikut:

$$NPL = 8.41970880723 - 0.779624621398 * GDP + 0.0209997733923 * IHK + 0.772710534573 * BIR - 0.000908573196078 * EX$$

Tabel 6: Hasil Estimasi Hubungan Jangka Panjang Model NPL

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.	Keterangan
GDP	-0.779625	-3.042891	0.0049	Signifikan
IHK	0.021000	2.115444	0.0431	Signifikan
BIR	0.772711	10.70746	0.0000	Signifikan
EX	-0.000909	-5.363827	0.0000	Signifikan
C	8.419709	2.795549	0.0091	
R-Square	0.897975			
Adj. R-Square	0.883903			
F-statistik	63.81117			
Prob. F-statistik	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Hasil pengujian model NPL jangka panjang, secara simultan atau serentak, variable independent (GDP, IHK, BIR, dan EX) secara bersama-sama berpengaruh pada variable dependen (NPL). Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 < nilai signifikansi 5% ($\alpha=0.05$).

Secara parsial semua variable independen (GDP, IHK, BIR, dan EX) signifikan berpengaruh terhadap variable dependennya (NPL), yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas t-Statistik dari masing-masing variable yang nilainya kurang dari nilai signifikansi 5% ($\alpha=0.05$).

Pada variable GDP didapat nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.0049 yang mana nilainya kurang dari nilai signifikansi 5% ($\alpha=0.05$) sehingga kesimpulannya menolak H0 dan dapat dikatakan bahwa variable GDP berpengaruh terhadap variable NPL. Koefisien dari variabel GDP adalah sebesar 0.779625 dengan arah hubungan negative (-), artinya setiap kenaikan GDP sebesar 1 persen akan menurunkan nilai NPL sebesar 0.779625 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

Variabel IHK signifikan mempengaruhi NPL ditunjukkan dengan nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.0431 < 0.05. Untuk koefisien IHK adalah sebesar 0.021000 dengan arah hubungan positif (+), yang artinya dengan kenaikan IHK sebesar 1 satuan akan mampu meningkatkan NPL sebesar 0.021 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Variabel BIR signifikan berpengaruh terhadap NPL dengan nilai probabilitas t-Statistik 0.0000 < 0.05. koefisien untuk variable BIR (BI Rate) adalah sebesar 0.772711 dengan arah hubungan positif (+). Dengan asumsi *ceteris paribus*, setiap kenaikan BI Rate 1 persen maka akan dapat meningkatkan NPL sebesar 0.772711 persen.

Sedangkan pada variable EX memiliki koefisien sebesar 0.000909 dengan arah hubungan negatif, sehingga saat variable EX naik 1 Rupiah akan dapat menurunkan NPL sebesar 0.000909 persen. Variabel ini secara parsial signifikan mempengaruhi NPL dengan nilai probabilitas t-Statistik sebesar 0.0000 yang mana nilai ini kurang dari nilai signifikansi 5% ($\alpha=0.05$).

Nilai R-Square sebesar 0.897975 atau 89% menunjukkan kelima variable dependen (GDP, IHK, BIR, dan EX) mampu menjelaskan variable dependen (NPL) sebesar 89% dalam jangka panjang dan sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar model.

Sedangkan Hasil estimasi model NPF untuk hubungan jangka panjang, didapatkan persamaan regresi dan hasil estimasi seabgai berikut:

$$\text{NPF} = - 30.1596824263 + 0.343611793034*\text{GDP} - 0.201221314807*\text{LN_IHK} - 0.468197319143*\text{BIR} + 4.32776657604*\text{LN_EX}$$

Tabel 7: Hasil Estimasi Hubungan Jangka Panjang Model NPF

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.	Keterangan
GDP	-0.281590	-0.743487	0.4632	Tidak Signifikan
IHK	-2.30E-05	-0.001570	0.9988	Tidak Signifikan
BIR	0.223935	2.099171	0.0446	Signifikan
EX	-0.000291	-1.162246	0.2546	Tidak Signifikan
C	6.803413	1.528102	0.1373	
R-Square	0.244156			
Adj. R-Square	0.139902			
F-statistik	2.341930			
Prob. F-statistik	0.078405			

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 7.0 (2015).

Dari hasil pengujian jangka panjang, secara simultan variabel GDP, IHK, BIR, dan EX berpengaruh terhadap NPF. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas F-statistik yang nilainya 0.078405 dimana kurang dari tingkat signifikansi 10% ($0.078405 < 0.05$).

Dengan uji parsial, didapatkan hanya BIR yang signifikan berpengaruh terhadap NPF dalam jangka panjang. Nilai probabilitas t-Statistik variabel BIR adalah sebesar 0.0446 yang nilai tersebut kurang dari tingkat signifikansi 5% maupun 10% ($0.0446 < 0.05$) sehingga kesimpulannya adalah menolak H_0 atau dengan kata lain variabel BIR signifikan berpengaruh terhadap NPF. Variabel BIR memiliki koefisien 0.223935 dengan tanda hubungan positif (+), artinya saat BIR naik 1 persen maka akan menaikkan NPF sebesar 0.22 persen.

Sedangkan pada variabel GDP, IHK, dan EX didapatkan nilai probabilitas t-Statistik 0.4632, 0.9988 dan 0.2546 yang mana nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%, sehingga kesimpulannya adalah menerima H_0 bahwa variabel GDP, IHK, EX tidak signifikan berpengaruh terhadap NPF dalam jangka panjang.

Pada model jangka panjang ini memiliki nilai R-Square sebesar 0.244156 atau 24%, artinya variasi variabel independen (GDP, LN_IHK, BIR, dan LN_EX) hanya dapat menjelaskan variabel dependen (NPF) sebesar 24% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model estimasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pertumbuhan GDP Terhadap NPL dan NPF

Hipotesis pertama adalah untuk menguji pengaruh dari variabel pertumbuhan GDP terhadap NPL dan NPF dengan arah hubungan diharapkan adalah negative. Untuk jangka pendek, variabel pertumbuhan GDP berpengaruh namun tidak signifikan terhadap NPL. Dalam jangka pendek pada variabel dependen NPF, variabel pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap NPF yang mana untuk uji secara simultan pada model ECM tidak menunjukkan adanya hubungan jangka pendek. Dalam jangka pendek tidak signifikan berpengaruhnya pertumbuhan GDP terhadap NPL bisa disebabkan bahwa pelaku ekonomi mampu menyesuaikan atau kembali pada tingkat keseimbangan akibat perubahan pertumbuhan GDP dalam jangka pendek sehingga tidak akan cukup berpengaruh pada NPL.

Dalam jangka panjang pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan negative terhadap NPL sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini sesuai dengan teori secara umum saat tingkat pertumbuhan GDP meningkat maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi (Samuelson, 2001), sehingga saat aktivitas ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat akan naik yang pada akhirnya meningkatkan pula kapasitas bagi peminjam dana atau debitur untuk mengembalikan pinjamannya. Saat kapasitas pembayaran pinjaman atau kredit dari debitur meningkat dengan kata

lain pembayaran kredit akan tepat waktu beserta bunganya, sehingga probabilitas kemungkinan terjadi kredit bermasalah akan berkurang. Selain itu, penurunan GDP riil juga merupakan karakteristik umum terjadinya resesi (Samuelson, 2001), terjadinya resesi akan menyebabkan kelesuan ekonomi yang berdampak pada siklus bisnis debitur serta pada akhirnya berpengaruh pada profitabilitas bisnis.

Pertumbuhan GDP menunjukkan hasil yang tidak signifikan berpengaruh terhadap NPF dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan baik pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah maupun tingkat kredit bermasalah secara nominal masih relative kecil, sehingga adanya shock atau perubahan pada variabel pertumbuhan GDP tidak cukup berdampak pada rasio NPF.

Tidak berpengaruhnya variabel GDP terhadap NPL maupun NPF dalam jangka pendek disebabkan karena pertumbuhan GDP atau pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi jangka panjang (Putong, 2002), sehingga perubahan pertumbuhan GDP dalam jangka pendek tidak akan cukup berdampak pada NPL dan NPF dalam jangka pendek.

Sedangkan pengaruh pertumbuhan GDP terhadap NPF yang dalam jangka panjang tidak signifikan berpengaruh bahkan dalam jangka pendek tidak berpengaruh disebabkan pada Bank Syariah yang lebih tahan terhadap guncangan variabel makroekonomi. Terbukti pada saat resesi maupun krisis bank syariah lebih mampu bertahan dibandingkan bank-bank konvensional. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pembiayaan yang tetap tinggi pada tahun-tahun resesi 2008/2009 (Bank Indonesia, 2013).

Pengaruh Inflasi Terhadap NPL dan NPF

Uji hipotesis kedua yakni untuk melihat pengaruh dari variabel inflasi terhadap NPL/NPF dengan arah hubungan yang diharapkan adalah positif, pada penelitian ini Inflasi diproksi dalam indeks harga konsumen (IHK). Dalam jangka pendek IHK tidak signifikan berpengaruh terhadap NPL. Untuk jangka pendek variabel IHK tidak berpengaruh terhadap NPF baik secara simultan maupun parsial.

Sehingga dapat dikatakan tidak terdapat hubungan jangka pendek antara pertumbuhan inflasi (IHK) dan NPF bank syariah dalam jangka pendek. Seperti halnya pada pertumbuhan GDP, penyebab tidak signifikannya IHK berpengaruh pada NPF karena nilai pembiayaan dan kredit bermasalah pada bank syariah secara nominal masih relative kecil bila dibandingkan dengan bank konvensional sehingga dampak inflasi tidak signifikan pada NPF. Selain itu inflasi yang terjadi pada periode observasi tidak separah inflasi yang terjadi pada saat krisis 1997/1998 yang mencapai hyper inflasi sehingga dapat menyulitkan debitur. Kecuali pada tahun 2008, angka inflasi masih berhasil dijaga dibawah 10% (Badan Pusat Statistik, 2015) sehingga masih mampu diatasi debitur. Perubahan laju inflasi yang meningkat dalam jangka pendek tidak langsung menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti perkembangan kebutuhan atau mengurangi konsumsi. Fisher (dalam Mankiw, 2007) menyebutkan bahwa kenaikan inflasi dalam waktu singkat (jangka pendek) tidak akan menyurutkan keinginan masyarakat untuk mengikuti pemenuhan kebutuhan, maka dampak risiko kredit dalam jangka pendek masih dapat terkendali.

Hasil pengujian terhadap variabel dependen NPL menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis untuk jangka panjang. IHK berpengaruh signifikan terhadap NPL dengan arah hubungan positif sesuai dengan hipotesis. Secara teori disebutkan bahwa saat tingkat harga secara umum naik atau terjadi inflasi maka akan berakibat pada perubahan daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun (Putong, 2002).

Sehingga saat daya beli masyarakat menurun akan berdampak pada profitabilitas perusahaan sebab permintaan akan barang dan jasa akan turun, maka hal ini menjadi kesulitan bagi produsen debitur untuk membayar pinjaman. Sedangkan pada pinjaman konsumen dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan tetap atau secara riil pendapatan turun saat inflasi maka pendapatan hanya akan cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan debitur akan mengalami keterlambatan dalam pembayaran kembali kredit beserta bunganya.

Untuk Pengujian hipotesis kedua terhadap variabel dependen NPF dalam jangka panjang menunjukkan hasil bahwa IHK tidak signifikan berpengaruh. Ketidaksignifikanan NPF terhadap variabel Makroekonomi lebih disebabkan karena Bank Syariah hanya melakukan kegiatan intermediasi dan bukan menjadi bank untuk investasi seperti pada bank konvensional. Telah terbukti dari beberapa penelitian bahwa bank syariah lebih tahan terhadap guncangan krisis ataupun resesi yang berdampak pada makroekonomi. Pada penelitian Poetry dan Sanrego (2011), penyebab terjadinya NPF adalah berasal dari mikroekonomi internal bank syariah itu sendiri seperti FDR dan CAR

Pengaruh BI Rate Terhadap NPL dan NPF

Hasil pengujian hipotesis ketiga yakni untuk melihat pengaruh dari variabel BI Rate terhadap NPL dan NPF. Untuk jangka pendek BI Rate berpengaruh tidak signifikan terhadap NPL. Pengaruh BI Rate terhadap NPF pada jangka pendek menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh atau dapat dikatakan tidak terdapat hubungan jangka pendek antara BI Rate dan NPF.

Untuk jangka panjang variabel BI Rate berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Perubahan pada BI Rate diharapkan akan diikuti oleh perubahan suku bunga bank seperti suku bunga kredit, suku bunga tabungan, dan suku bunga deposito (Bank Indonesia, 2013). Kenaikan BI Rate biasanya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman bank, saat suku bunga pinjaman meningkat berarti biaya meminjam dana atau beban debitur akan semakin berat ditanggung oleh debitur dengan asumsi pendapatan debitur tetap maka risiko kredit bermasalah akan semakin meningkat.

Pengujian hipotesis ketiga terhadap variabel dependen NPF menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan pada jangka panjang dengan arah hubungan positif, Saat BI Rate naik dan berpengaruh terhadap peningkatan suku bunga pinjaman pada bank konvensional hal tersebut menguntungkan perbankan syariah karena marginnya akan semakin bersaing dengan bank konvensional, sehingga saat margin bagi bank syariah semakin kompetitif maka pembiayaan akan meningkat. Margin bagi hasil bank syariah yang lebih kompetitif terhadap bank konvensional dapat berdampak pada kenaikan permintaan pembiayaan bank syariah, maka saat terjadi kenaikan permintaan pembiayaan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin tinggi.

Tidak signifikannya BI Rate terhadap NPL dan NPF dalam jangka pendek namun signifikan dalam jangka panjang tidak terlepas dari jangka waktu kredit atau pembiayaan yang sifatnya jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga baik NPL maupun NPF adalah dampak yang bersifat jangka panjang sebab sebagian besar kredit maupun pembiayaan adalah kredit atau pembiayaan jangka menengah hingga jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Sedangkan pengaruhnya BI Rate terhadap NPF bank syariah tidak terlepas dari akad yang digunakan dalam pembiayaan. Komposisi pembiayaan pada bank syariah didominasi oleh pembiayaan akad murabahah yang mana dengan prinsip jual beli murabahah pendapatan yang diperoleh bank bersifat tetap atau menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti sebab margin yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap debitur telah ditentukan di awal (Wahyudi, dkk, 2013).

Berbeda dengan pembiayaan dengan akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang mana bagi hasil bergantung pada untung/rugi pihak debitur (Antonio, 2001), maka saat debitur mengalami kerugian bank syariah tidak akan mendapatkan bagi hasil dan justru dapat pula menanggung risiko kerugian bersama debitur. Wahyudi, dkk (2013) menyebutkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah sangat fleksibel mengikuti dinamika pasar, artinya jika pasar dalam kondisi baik dan tumbuh maka bank akan dapat imbal hasil lebih besar dan begitupun sebaliknya, jika tumbuh negative maka bank akan ikut menanggung kerugian nasabah atau bahkan mentransfer risiko tersebut kepada nasabah.

Pengaruh Nilai Tukar Terhadap NPL dan NPF

Uji hipotesis ke empat untuk mengetahui pengaruh dari nilai tukar terhadap NPL dan NPF. Untuk jangka pendek nilai tukar (EX) berpengaruh signifikan negative terhadap NPL. Arah hubungan yang negative tidak sesuai dengan hipotesis. Sedangkan pada NPF untuk jangka pendek nilai tukar tidak berpengaruh terhadap NPF dikarenakan terdapat hubungan jangka pendek antara nilai tukar dan NPF. Bila dilihat pada data kredit valas pada bank syariah, nilainya sangat kecil bisa dibandingkan dengan bank konvensional yakni berada pada kisaran 2 hingga 10 Triliun pada 2008-2013 sehingga perubahan nilai tukar tidak akan cukup berdampak pada NPF bank syariah dalam jangka pendek.

Untuk jangka panjang, hasil estimasi menyimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap NPL dengan arah hubungan negative, hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa nilai tukar berpengaruh pada NPL namun dengan arah hubungan yang tidak sesuai. Saat nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat artinya nilai tukar rupiah terdepresiasi, harga mata uang asing akan jauh lebih mahal sehingga permintaan kredit valas akan turun dan probabilitas terjadinya kredit bermasalah akan turun. Hasil ini sesuai dengan penelitian Poetry dan Sanrego (2011), saat nilai tukar meningkat maka produk dalam negeri akan lebih kompetitif karena harganya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Maka permintaan luar negeri akan meningkat dan dengan kata lain ekspor akan meningkat, kondisi keuangan produsen akan membaik dan produsen sebagai debitur akan mampu membayar kreditnya.

Sedangkan hasil pengujian hipotesis ke empat terhadap NPF menunjukkan hasil bahwa dalam jangka panjang nilai tukar berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF bank syariah. Hal ini disebabkan pembiayaan dalam valas pada perbankan syariah nilainya rata-rata pada kisaran 5% dari total pembiayaan yang disalurkan (Bank Indonesia, 2013), sehingga perubahan nilai tukar tidak cukup berdampak bahkan hampir tidak berdampak pada NPF bank syariah. Selain itu, exposure pembiayaan pada bank syariah yang lebih diarahkan pada aktivitas sektor riil perekonomian domestic sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan system keuangan global (Bank Indonesia, 2013).

Secara umum, Bank Indonesia telah mengatur dalam PBI Nomor 12/10/PBI/2010 tentang posisi devisa neto bank umum, dalam PBI tersebut diatur bahwa bank umum wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto maksimal 20% dari total modal yang dimiliki oleh bank. Selain itu melihat historis nilai tukar rupiah yang terdepresiasi tajam pada krisis 1997/1998 yang membuat membengkaknya kredit macet hingga kejatuhan perbankan. Dari peraturan Bank Indonesia tersebut serta historis yang pernah mengalami perbankan akibat fluktuasi nilai tukar maka dapat dikatakan bahwa setiap bank menyalurkan kredit dalam bentuk valuta asing dalam jumlah yang kecil dari total kredit yang diberikan untuk mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.

Dalam Laporan Kebijakan Moneter kuartal IV 2013 (Bank Indonesia, 2013), meskipun kondisi perbankan tengah menghadapi pelemahan pertumbuhan kredit, tekanan pelemahan nilai tukar, dan peningkatan suku bunga namun tetap rendah dan dijaga stabil. Hal ini menandakan Bank Umum lebih berhati-hati terhadap pemberian kredit dalam valas sebab dapat memberikan tekanan yang tinggi terhadap bank bila terjadi depresiasi nilai tukar yang tajam serta bank umum lebih tahan terhadap depresiasi nilai tukar. Pada Bank konvensional nilai tukar berpengaruh pada NPL sebab kredit dalam valas berada pada kisaran 17% dari total kredit yang disalurkan (Bank Indonesia, 2013), meskipun demikian dari hasil uji statistic pengaruhnya tidak terlalu besar ditunjukkan dengan nilai koefisien yang hanya sebesar 0.000909%.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa variabel pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai Tukar lebih berpengaruh terhadap NPL Bank Konvensional, sedangkan pada Bank syariah tidak berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik yang berbeda antara bank konvensional dan bank syariah seperti penggunaan bunga serta bagi hasil, serta akad yang lebih banyak dalam bank syariah dapat mendiversifikasi risiko kredit. Meskipun rasio NPF pada bank syariah masih sedikit lebih tinggi dibanding syariah namun hal ini bukan disebabkan oleh variabel makro ekonomi dan moneter seperti pertumbuhan GDP, Inflasi, BI Rate, dan nilai tukar. Lebih tingginya NPF bank syariah dibanding NPL bank konvensional dikarenakan komposisi pembiayaan bank syariah didominasi oleh pembiayaan UKM yakni pada kisaran 65% dari total pembiayaan yang disalurkan (Bank Indonesia, 2013). Telah terbukti melalui beberapa penelitian bahwa sektor UKM lebih mampu bertahan dan pulih dengan cepat terhadap resesi atau bahkan krisis. Begitupun Bank syariah telah banyak penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh beberapa variabel makroekonomi terhadap NPF dan menunjukkan tidak adanya pengaruh. Seperti halnya pada penelitian Poetry dan Sanrego (2011) bahwa NPF bank syariah lebih disebabkan mikro internal bank itu sendiri seperti CAR dan FDR.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara garis besar kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai tukar rupiah terhadap dollar secara bersama-sama berpengaruh pada NPL bank konvensional. Variabel yang berpengaruh signifikan pada NPL bank konvensional dalam jangka panjang adalah pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai tukar rupiah terhadap dollar. Sedangkan dalam jangka pendek hanya nilai tukar yang berpengaruh signifikan terhadap NPL.
2. Sedangkan pada NPF bank Syariah menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai tukar rupiah terhadap dollar secara bersama-sama berpengaruh pada NPF bank syariah. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap NPF dalam jangka panjang adalah BI Rate dan nilai tukar. Dalam jangka pendek, keempat variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan berpengaruh pada NPF. Terlihat bahwa dalam jangka panjangpun hanya dua variabel dari empat variabel yang

berpengaruh signifikan pada NPF. Hal ini seperti halnya beberapa penelitian terdahulu bahwa bank syariah lebih tahan terhadap guncangan krisis, sebab saat krisis determinan makroekonomi akan mengalami perubahan, dan bank syariah tidak merespon atas shock yang terjadi pada makroekonomi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar perbankan dapat mereduksi risiko sistemik yang diakibatkan determinan makroekonomi adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk tetap menjaga BI Rate stabil dalam jangka pendek dan tidak meningkatkan BI Rate cukup tinggi bila dirasa pelaku ekonomi dapat kembali pada tingkat ekuilibriumnya atau dapat menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi dalam jangka pendek.
2. Sedangkan pada nilai tukar yang terbukti signifikan pada kredit bermasalah kedua jenis bank pada jangka panjang dan signifikan pada jangka pendek pada NPL, maka diharapkan pemerintah mampu menjaga nilai tukar rupiah pada kisaran dibawah Rp.10.000,00 sebab bila tidak akan dapat meningkatkan kredit bermasalah cukup tajam. Selain itu kejatuhan nilai mata uang bisa menjadi tanda awal krisis seperti yang terjadi pada krisis ekonomi 1997/1998 yang diawali dengan jatuhnya nilai mata uang beberapa negara yang pada akhirnya juga berdampak pada ambruknya sektor perbankan dan membengkaknya kredit bermasalah.
3. Pertumbuhan GDP tampaknya tidak menjadi variabel makroekonomi utama yang dapat berpengaruh, sebab pertumbuhan GDP berhasil dijaga stabil selama beberapa tahun terakhir dan mengalami pelemahan yang signifikan hanya pada periode tahun 2009. Stabilitasnya pertumbuhan GDP memberikan kepastian bagi para pelaku ekonomi sehingga kegiatan ekonomi berjalan sesuai yang diharapkan para pelaku ekonomi. Maka diharapkan pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan GDP secara kontinue agar kepastian ekonomi mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan berdampak baik bagi kapasitas debitur.
 4. Untuk Inflasi (IHK), dapat terlihat bahwa fluktuasi tajam pada inflasi dapat membuat tingginya tingkat kredit bermasalah hingga mencapai lebih dari 5%. Sebab ketidakpastian harga di pasar dapat membuat pelaku ekonomi berspekulasi, dan merasakan ketidakpastian akan kegiatan ekonomi kedepannya saat harga naik. Maka diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan harga yang tepat, dengan menyesuaikan kondisi perekonomian global maupun perekonomian dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R. Dyah W. Sari, Rahmat H. Setianto, Martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariefianto, M.Doddy. 2012. *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Indonesia*. <http://www.bi.go.id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx> diakses pada 10 Desember 2014.
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah*. <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah> diakses pada 24 November 2014.
- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Diulio, A. Eugene. 1993. *Uang dan Bank*. Jakarta : Erlangga.
- Hasibuan. Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Machfud, A. & Rukmana. 2010. *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N.G. 2007. *Macroeconomics 6th Edition*. Terjemahan oleh Wibi Hardani, Devri Barnadi, & Suryadi Saat. Jakarta : Erlangga.
- Poetry, Zakiyah D. & Sanrego, Yulizar D. 2011. Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *Perbankan Syariah. Islamic Finance & Business Review Journal*, Vol. 6, No.2.
- Putong, Iskandar. 2002. *Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rustam, B.R. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samuelson P.A & Nordhaus W.D. 2001. *Ilmu Makro Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Wahyudi, Imam. Dewi, Miranti K. Rosmanita, Fenny. Prasetyo, Muhammad Budi. Putri, Niken Iwani S.P. Haidir Banu M. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Perekonomian Indonesia : Catatan dari Luar Pagar*. Malang: Banyumedia Publising.